

Kebijakan Terintegrasi Untuk Ketahanan Lingkungan Melalui Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa

Yudie Andrew Pratama Loemoindong¹, Rahmuniar², Aswar Annas³

^{1,2,3}Universitas Pepabri Makassar, Jl. Letjen Hertasing No.106 Makassar

Corresponding Author: yudie_lumoindong@unpepabri.ac.id

Keyword:

Plastic Pollution;
Environmental policy;
Plastic Pollution
Resolution;
Policy
implementation.

Abstract: This research explores the implementation of the Plastic Pollution Resolution in the Gowa Regency, addressing the major problem of serious plastic pollution and its impact on the environment and public health. The goal is to analyze how the policy influences the reduction of single-use plastics, the improvement of recycling infrastructure, and the barriers to its implementation. The research methods used include a qualitative approach using interviews, documentation, observation, and Focus Group Discussion (FGD) and data analysis using Nvivo 12 Plus. This research identified significant barriers to implementing plastic pollution management policies in the Gowa Regency, including inadequate regulations, low public awareness, lack of resources, and weak coordination. Unclear regulations and minimal public education hamper policy effectiveness. Recommended solutions include regulatory reform, increased awareness campaigns, and investment in recycling infrastructure. Increased coordination between government, industry and society can strengthen policy implementation and support local environmental sustainability.

Kata Kunci:

Polusi Plastik;
Kebijakan lingkungan;
Resolusi Polusi
Plastik;
Implementasi
kebijakan.

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa, menghadapi masalah utama polusi plastik yang serius dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan infrastruktur daur ulang, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), serta analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa, termasuk regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang lemah. Regulasi yang kurang jelas dan edukasi publik yang minim menghambat efektivitas kebijakan. Solusi yang direkomendasikan meliputi reformasi regulasi, peningkatan kampanye kesadaran, serta investasi dalam infrastruktur daur ulang. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung keberlanjutan lingkungan lokal.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Gowa menghadapi ancaman serius polusi plastik, dengan proyeksi *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada 2040, 29 juta ton plastik dapat memasuki ekosistem perairan (Armansyah, 2023). Hal ini menegaskan urgensi tindakan di tingkat lokal. Secara umum, polusi plastik merupakan ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Deng & Liu, 2024; Lewin et al., 2024; K. A. Willis et al., 2024). Dari laut hingga daratan, plastik mencemari berbagai ekosistem, mengancam keberlangsungan flora dan fauna (Bandyopadhyay et al., 2023; Ershova et al., 2021; Okoffo et al., 2024). Selain itu, plastik yang terurai lambat menjadi sumber toksin yang merusak ekosistem dan dapat meracuni rantai

makanan (John & Mishra, 2024). Penanganan serius diperlukan untuk membatasi dampak negatifnya dan mendorong keberlanjutan lingkungan global. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemberdayaan daur ulang, edukasi publik, dan regulasi yang ketat merupakan langkah kunci dalam menghadapi ancaman serius polusi plastik (Lakhiar et al., 2024; Maruf et al., 2024; Miguel et al., 2024; Thushari & Senevirathna, 2020). Ini merupakan jalan menuju resolusi polusi plastik, dan pemerintah Kabupaten Gowa juga ikut mengadopsi pendekatan tersebut.

Resolusi Polusi Plastik adalah sebuah keputusan atau pernyataan resmi yang diadopsi oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatif polusi plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Carlini & Kleine, 2018; Islam et al., 2024). Resolusi ini mencakup serangkaian langkah konkret dan strategi kebijakan, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan infrastruktur daur ulang, pemberdayaan masyarakat, serta implementasi regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah plastik (Haward, 2018). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi produksi, distribusi, dan penggunaan plastik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (Bundela & Pandey, 2022). Melalui Resolusi Polusi Plastik, komitmen bersama dapat dibangun untuk melindungi alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang (Silva Filho & Velis, 2022).

Resolusi Polusi Plastik juga memperkuat kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menghadapi masalah polusi plastik. Dengan adopsi dan implementasi resolusi ini, diharapkan terjadi perubahan nyata dalam pola konsumsi dan perilaku pengelolaan sampah, menuju sebuah masa depan di mana lingkungan yang bersih dan sehat menjadi warisan yang berharga bagi semua (Karasik et al., 2020). Adopsi Resolusi Polusi Plastik telah menjadi tren global, dengan banyak pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini (Bank et al., 2021). Adopsi Resolusi Polusi Plastik juga memberikan kontribusi signifikan pada ketahanan lingkungan dengan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah plastik (Kumar et al., 2021). Langkah-langkah ini membantu memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk masa depan.

Kebijakan global mengimplementasikan Resolusi Polusi Plastik melalui berbagai mekanisme, termasuk perjanjian internasional, regulasi perdagangan, kampanye kesadaran global, serta kerja sama lintas negara dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan (Raha et al., 2021). Pemerintah di berbagai belahan dunia telah bekerja sama dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah polusi plastik (Issifu & Sumaila, 2020). Selain itu, ada dorongan bagi perusahaan dan industri untuk mengadopsi praktik-produksi yang lebih ramah lingkungan, dan banyak negara telah menerapkan pajak atau larangan terhadap produk plastik sekali pakai sebagai langkah konkret dalam mengurangi konsumsi dan pencemaran plastik (Saleem et al., 2023).

Pendekatan pemecahan masalah mencakup serangkaian strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, dilakukan kampanye edukasi publik yang luas untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif polusi plastik dan pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta praktik daur ulang. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Gowa juga dimungkinkan bekerja sama dengan industri lokal untuk menerapkan regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah plastik dan menginisiasi program insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan. Selain itu, mempertimbangkan infrastruktur daur ulang yang lebih luas dan efisien untuk mendukung pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan. Pendekatan ini diperkuat dengan kerjasama aktif antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan lokal seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik dan efektif dalam menangani masalah polusi plastik serta mencapai ketahanan lingkungan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Gowa.

Meskipun beberapa studi telah mulai mengkaji masalah sampah dengan pendekatan Resolusi Polusi Plastik, namun masih minim temuan spesifik terkait respon pemerintah di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, serta implementasi kebijakan yang mengemuka. Kebaruan pendekatan ini terletak pada fokus yang diberikan pada implementasi kebijakan di tingkat lokal, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi dalam mengatasi polusi plastik. Dengan demikian, pendekatan ini menghasilkan Kebijakan Terintegrasi untuk Ketahanan Lingkungan yang berpotensi menjadi landasan yang kuat untuk penanganan polusi plastik di tingkat lokal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada dua aspek krusial: pertama, bagaimana implementasi resolusi tersebut memengaruhi perubahan perilaku dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta peningkatan infrastruktur daur ulang sampah di Kabupaten Gowa; kedua, apa hambatan utama yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut di tingkat lokal, termasuk tantangan regulasi, kesadaran masyarakat, serta ketersediaan sumber daya, dan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dapat diintegrasikan untuk mengatasi hambatan tersebut demi mencapai ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data, wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dinamika terkait polusi plastik di Kabupaten Gowa. Sumber data digunakan untuk mendukung analisis situasi awal dan konteks kebijakan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, ahli lingkungan, aktivis masyarakat, dan perwakilan industri lokal, untuk mendapatkan wawasan langsung tentang persepsi dan pengalaman mereka terkait implementasi kebijakan. Informan ini dipilih karena mereka memiliki peran dan perspektif yang relevan dalam pemahaman menyeluruh terhadap isu polusi plastik serta implementasi kebijakan di Kabupaten Gowa. Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan dan langkah-langkah implementasinya. Dokumentasi mencakup dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, data lingkungan, dan arsip keputusan atau peraturan yang terkait dengan penanganan polusi plastik di Kabupaten Gowa. Observasi langsung dilakukan untuk memahami praktik dan perilaku terkait pengelolaan sampah dan polusi plastik di wilayah tersebut. Terakhir, FGD digunakan sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu terkait polusi plastik dengan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif, memfasilitasi pertukaran gagasan dan pemahaman yang lebih dalam. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan Nvivo 12 Plus.

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus yang memungkinkan pengorganisasian dan penafsiran data kualitatif secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan FGD dianalisis melalui proses coding untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Proses ini juga mencakup triangulasi, yaitu perbandingan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi, serta menerapkan analisis berbasis perangkat lunak yang canggih, validitas dan kredibilitas hasil penelitian dapat dipertahankan dan diperkuat, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika polusi plastik di Kabupaten Gowa.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa merupakan langkah signifikan dalam menghadapi tantangan polusi plastik yang kian mendesak. Bagian ini membahas

implementasi kebijakan tersebut terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta peningkatan infrastruktur daur ulang di daerah ini.

Implementasi Resolusi terhadap Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Peningkatan Infrastruktur Daur Ulang di Kabupaten Gowa

Masalah sampah di Kabupaten Gowa menjadi semakin mendesak mengingat dampaknya yang meluas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah, terutama plastik, yang terlihat di berbagai lokasi publik seperti pinggir jalan, mencerminkan kegagalan dalam sistem pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Situasi ini tidak hanya merusak estetika lingkungan tetapi juga berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta mempengaruhi kualitas hidup. Gambar 1 menunjukkan kondisi sampah plastik yang menumpuk hingga ke pinggir jalan di Kabupaten Gowa (Maryadi, 2019). Penumpukan sampah plastik di area publik ini mencerminkan masalah serius terkait pengelolaan sampah yang tidak efektif. Sampah plastik yang tersebar di sepanjang pinggir jalan tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga mengganggu pemandangan dan kesehatan masyarakat, menambah masalah polusi dan menciptakan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Ini memerlukan resolusi terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.



Gambar. 1

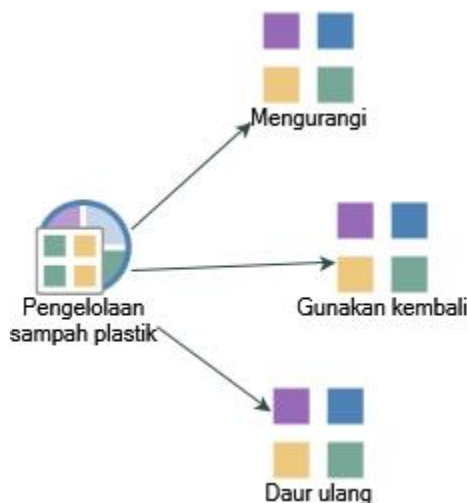
Sampah plastik di Kabupaten Gowa

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa dimulai dengan pengadopsian kebijakan strategis untuk menangani masalah sampah plastik secara menyeluruh. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gowa mengimplementasikan resolusi ini dengan fokus pada pengurangan plastik sekali pakai serta peningkatan infrastruktur daur ulang. Langkah ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, yang menekankan urgensi masalah polusi plastik global dan menyerukan kolaborasi seluruh stakeholder untuk memerangi ancaman tersebut (Armansyah, 2023). Melalui resolusi ini, Pemkab Gowa bertujuan untuk mengatur dan mengelola sampah plastik dari sumbernya hingga menjadi limbah, dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini.

Dalam praktiknya, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momen penting untuk memperkenalkan dan memperkuat kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Gowa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Azhari Azis, menyatakan bahwa

kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang penyemangat masyarakat, tetapi juga sebagai kampanye untuk mengurangi polusi plastik melalui metode *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.



Gambar. 2

Kampanye untuk mengurangi polusi plastik

Sumber: Dolah Peneliti, 2024

Metode *reduce* (pengurangan) adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam pengelolaan sampah plastik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi jumlah plastik yang digunakan sejak awal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengubah pola konsumsi dan memilih produk dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan (Boronat et al., 2024; Nuojuua et al., 2024). Misalnya, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, menghindari produk sekali pakai, dan memilih barang dengan kemasan yang mudah didaur ulang. Dengan mengurangi jumlah plastik yang diproduksi dan dikonsumsi, kita dapat meminimalkan volume sampah plastik yang masuk ke lingkungan.

Metode *reuse* (pemanfaatan kembali) berfokus pada penggunaan kembali barang atau bahan yang sudah ada, daripada membuangnya. Pemanfaatan kembali membantu memperpanjang umur pakai produk dan mengurangi kebutuhan untuk produk baru (Magni et al., 2024). Contoh penerapan metode ini termasuk menggunakan botol atau wadah plastik untuk keperluan lain, mengganti barang-barang sekali pakai dengan alternatif yang bisa dipakai ulang, dan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Dengan memanfaatkan kembali barang, kita mengurangi beban sampah yang dihasilkan dan mengurangi permintaan untuk produksi barang baru.

Metode *recycle* (daur ulang) melibatkan proses mengolah sampah plastik menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan kembali. Daur ulang mengubah plastik bekas menjadi produk baru melalui proses fisik atau kimia, yang mengurangi kebutuhan akan plastik baru dan mengurangi limbah (Mneimneh et al., 2024; Muhmood, 2024). Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilahan, pencucian, dan peleburan plastik untuk menghasilkan bahan yang dapat digunakan dalam produksi barang baru. Dengan mendaur ulang plastik, kita membantu mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik dan mendukung perekonomian sirkular yang lebih berkelanjutan.

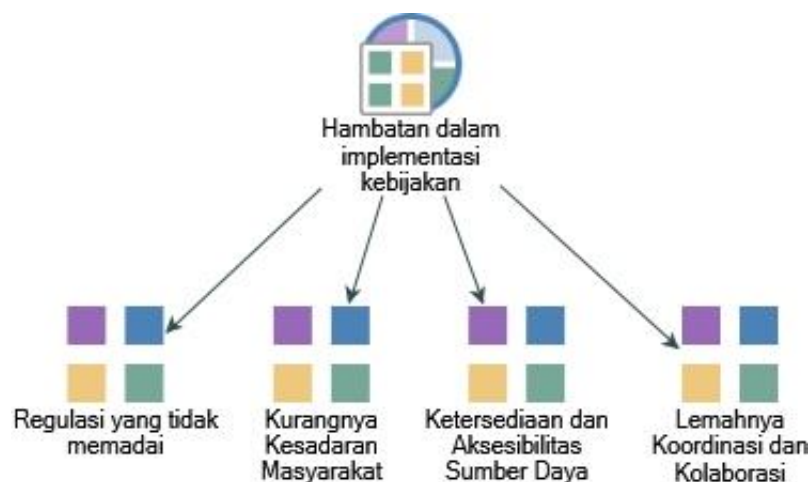
Kampanye pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengoptimalkan implementasi metode *reduce*, *reuse*, dan *recycle* merupakan langkah strategis dalam menangani polusi plastik secara menyeluruh. Dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang ada, dan mendaur ulang plastik yang sudah tidak terpakai, pemerintah berusaha mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan ekonomi sirkular. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Melalui kampanye ini, diharapkan seluruh komunitas dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung keberlanjutan ekosistem Kabupaten Gowa.

Kampanye pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengoptimalkan metode *reduce*, *reuse*, dan *recycle* menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam. Meskipun inisiatif ini menunjukkan niat baik untuk mengatasi polusi plastik, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada seberapa efektif strategi ini diterapkan di lapangan. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai memerlukan perubahan mendasar dalam pola konsumsi yang mungkin sulit dicapai tanpa dukungan regulasi yang kuat dan kampanye kesadaran yang intensif. Pemanfaatan kembali barang harus didukung oleh fasilitas yang memadai dan edukasi tentang cara yang tepat untuk melakukannya, sementara daur ulang memerlukan infrastruktur yang efisien dan proses yang transparan. Tanpa penanganan yang komprehensif terhadap tantangan-tantangan ini, kampanye tersebut berisiko gagal memenuhi tujuan utamanya dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan di Kabupaten Gowa

Implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Tantangan utama termasuk regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan sumber daya. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak serta ketidakstabilan ekonomi dan politik turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.



Gambar. 3

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan di Kabupaten Gowa

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan plastik dan peningkatan daur ulang di Kabupaten Gowa adalah adanya regulasi yang tidak memadai atau tidak cukup mendukung penerapan kebijakan tersebut. Keterbatasan dalam peraturan yang ada dapat menghambat efektivitas kebijakan, terutama jika peraturan yang diterapkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan praktik lapangan. Ketidakjelasan dalam implementasi regulasi dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan aturan dan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi kurang konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peninjauan dan revisi regulasi agar lebih sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah plastik dan mendukung upaya-upaya pengurangan polusi.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak polusi plastik serta pentingnya daur ulang merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya pendidikan dan kampanye yang efektif, masyarakat mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka terkait penggunaan plastik dan pengelolaan

sampah. Edukasi yang kurang dapat mengakibatkan ketidaktahuan mengenai metode pengurangan plastik, penggunaan kembali barang, dan proses daur ulang. Untuk meningkatkan kesadaran, pemerintah dan organisasi terkait perlu melaksanakan kampanye yang berfokus pada pemahaman dampak lingkungan dan manfaat dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya seperti dana, teknologi, dan fasilitas daur ulang juga menjadi hambatan yang signifikan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik memerlukan investasi yang cukup dalam infrastruktur daur ulang dan teknologi yang mendukung. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, sulit untuk membangun dan memelihara fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah plastik secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai serta dukungan teknis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa.

Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga sering kali kurang efektif, yang dapat menghambat penerapan kebijakan pengelolaan sampah plastik. Kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan, serta mengurangi dampak positif yang diharapkan dari resolusi polusi plastik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat kemitraan dan menciptakan forum komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Kolaborasi yang efektif dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung kebijakan dan mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan yang diinginkan.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa menunjukkan kelemahan struktural yang signifikan, terutama dalam hal regulasi, kesadaran masyarakat, dan sumber daya. Regulasi yang tidak memadai dan tidak jelas sering kali menghambat penerapan kebijakan secara efektif, menciptakan celah yang memungkinkan pelanggaran dan penegakan yang lemah. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat, jika tidak diatasi dengan kampanye yang efektif dan berkelanjutan, dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap pengurangan penggunaan plastik dan daur ulang. Selain itu, ketidakcukupan dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur mempersulit pelaksanaan kebijakan yang memerlukan dukungan teknologi dan finansial yang memadai. Koordinasi yang lemah antara pemerintah, industri, dan masyarakat memperburuk situasi, mengurangi sinergi yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada reformasi menyeluruh dalam regulasi, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi yang efektif, investasi yang signifikan dalam infrastruktur, dan penguatan kerjasama antara semua pihak terkait.

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa, optimasi harus dilakukan pada beberapa aspek krusial. Pertama, regulasi perlu diperbaiki dengan mengadopsi peraturan yang lebih jelas, komprehensif, dan terintegrasi. Reformasi ini harus mencakup penetapan standar yang konkret serta mekanisme penegakan yang tegas, memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan kebijakan yang ada. Selain itu, perlu ada peninjauan berkala dan adaptasi terhadap peraturan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang berubah (da Costa et al., 2020). Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas melalui strategi edukasi yang lebih terarah dan berkelanjutan (K. A. Willis et al., 2024). Kampanye harus dirancang dengan pendekatan yang menarik dan mudah dipahami, serta melibatkan berbagai media dan platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan pengurangan plastik dan daur ulang, serta pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak polusi plastik, dapat membantu membangun kesadaran yang mendalam dan mendorong perubahan perilaku yang signifikan.

Ketiga, aspek ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya memerlukan perhatian khusus. Pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur daur ulang dan teknologi pengelolaan sampah yang efisien (K. Willis et al., 2018). Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, dukungan teknis, serta kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan

fasilitas dan teknologi yang diperlukan. Selain itu, memperkuat koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan sinergi dan pembagian tanggung jawab yang jelas akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Integrasi ini penting untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan polusi plastik.

Implikasi optimalisasi ini dapat saja membawa dampak besar dalam upaya mengurangi polusi plastik di Kabupaten Gowa. Regulasi yang lebih kuat dan mekanisme penegakan yang efektif menciptakan lingkungan yang tertib, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dan mematuhi kebijakan pengelolaan sampah plastik. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi berkelanjutan membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan meningkatkan praktik daur ulang. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah memperkuat kemampuan daerah dalam menangani limbah secara efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menghasilkan koordinasi terpadu dalam penanganan polusi plastik, memungkinkan terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut mencakup regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Regulasi yang kurang jelas dan tidak terintegrasi sering kali menghambat penegakan kebijakan, sementara kurangnya edukasi publik mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan dan daur ulang plastik. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang terbatas dan koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah, industri, dan masyarakat memperburuk situasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya reformasi menyeluruh dalam regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang efektif, dan investasi yang memadai dalam infrastruktur daur ulang. Peninjauan dan adaptasi regulasi yang berkala, serta peningkatan dukungan teknologi dan finansial, akan memperkuat kapasitas pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Gowa. Peningkatan koordinasi antara berbagai pihak dan pelibatan komunitas lokal dalam upaya pengurangan plastik dapat memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung keberlanjutan ekosistem lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2024.

REFERENSI

- Armansyah. (2023, June 6). Pemkab Gowa Adopsi Resolusi Polusi Plastik. *Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id*. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/06/06/pemkab-gowa-adopsi-resolusi-polusi-plastik/>
- Bandyopadhyay, A., Sinha, A., Thakur, P., Thakur, S., & Ahmed, M. (2023). A review of soil pollution from LDPE mulching films and the consequences of the substitute biodegradable plastic on soil health. *International Journal of Experimental Research and Review*, 32, 15–39.

<https://doi.org/10.52756/IJERR.2023.V32.002>

- Bank, M. S., Ok, Y. S., Swarzenski, P. W., Duarte, C. M., Rillig, M. C., Koelmans, A. A., Metian, M., Wright, S., Provencher, J. F., Sanden, M., Jordaan, A., Wagner, M., & Thiel, M. (2021). Global plastic pollution observation system to aid policy. *Environmental Science and Technology*, 55(12), 7770–7775. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00818>
- Boronat, C., Correcher, V., García-Guinea, J., & Bravo-Yagüe, J. C. (2024). Ultraviolet C radiation on polypropylene: A potential way to reduce plastic pollution. *Polymer Degradation and Stability*, 225, 110784. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.110784>
- Bundela, A. K., & Pandey, K. K. (2022). The United Nations General Assembly Passes Historic Resolution to Beat Plastic Pollution. *Anthropocene Science*, 1(2), 332–336. <https://doi.org/10.1007/s44177-022-00021-5>
- Carlini, G., & Kleine, K. (2018). Advancing the international regulation of plastic pollution beyond the united nations environment assembly resolution on marine litter and microplastics. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 27(3), 234–244. <https://doi.org/10.1111/reel.12258>
- da Costa, J. P., Mouneyrac, C., Costa, M., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. (2020). The Role of Legislation, Regulatory Initiatives and Guidelines on the Control of Plastic Pollution. *Frontiers in Environmental Science*, 8(July), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00104>
- Deng, M., & Liu, H. tao. (2024). Driving factors and potential offshore pollution of plastic mulch residue in farmland in the Yellow River Delta, China. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 364, 108902. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.108902>
- Ershova, A. A., Eremina, T. R., Dunayev, A. L., Makeeva, I. N., & Tatarenko, Y. A. (2021). Study of micro-plastic pollution in the seas of the Russian arctic and the far east. *Arktika: Ekologiya i Ekonomika*, 11(2), 164–177. <https://doi.org/10.25283/2223-4594-2021-2-164-177>
- Haward, M. (2018). Plastic pollution of the world's seas and oceans as a contemporary challenge in ocean governance. *Nature Communications*, 9(1), 9–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03104-3>
- Islam, M. S., Lee, Z., Shaleh, A., & Soo, H. Sen. (2024). The United Nations Environment Assembly resolution to end plastic pollution: Challenges to effective policy interventions. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 10927–10944. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03639-6>
- Issifu, I., & Sumaila, U. R. (2020). A review of the production, recycling and management of marine plastic pollution. *Journal of Marine Science and Engineering*, 8(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/jmse8110945>
- John, E. P., & Mishra, U. (2024). Integrated multitrophic aquaculture supply chain fish traceability with blockchain technology, valorisation of fish waste and plastic pollution reduction by seaweed bioplastic: A study in tuna fish aquaculture industry. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140056. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140056>
- Karasik, R., Vegh, T., Diana, Z., Bering, J., Caldas, J., Pickle, A., Rittschof, D., & Viridin, J. (2020). *20 Years of Government Responses to the Global Plastic Pollution Problem | The Nicholas Institute*

- for *Energy, Environment & Sustainability*. 1–309.
<https://nicholasinstitute.duke.edu/publications/20-years-government-responses-global-plastic-pollution-problem>
- Kumar, R., Verma, A., Shome, A., Sinha, R., Sinha, S., Jha, P. K., Kumar, R., Kumar, P., Shubham, Das, S., Sharma, P., & Prasad, P. V. V. (2021). Impacts of plastic pollution on ecosystem services, sustainable development goals, and need to focus on circular economy and policy interventions. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(17), 1–40.
<https://doi.org/10.3390/su13179963>
- Lakhiar, I. A., Yan, H., Zhang, J., Wang, G., Deng, S., Bao, R., Zhang, C., Syed, T. N., Wang, B., Zhou, R., & Wang, X. (2024). Plastic Pollution in Agriculture as a Threat to Food Security, the Ecosystem, and the Environment: An Overview. *Agronomy*, *14*(3), 14030548.
<https://doi.org/10.3390/agronomy14030548>
- Lewin, W. C., Sühling, R., Fries, E., Solomon, M., Brinkmann, M., Weltersbach, M. S., Strehlow, H. V., & Freese, M. (2024). Soft plastic fishing lures as a potential source of chemical pollution - Chemical analyses, toxicological relevance, and anglers' perspectives. *Science of the Total Environment*, *946*, 173884. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173884>
- Magni, S., Fossati, M., Pedrazzani, R., Abbà, A., Domini, M., Menghini, M., Castiglioni, S., Bertanza, G., Binelli, A., & Della Torre, C. (2024). Plastics in biogenic matrices intended for reuse in agriculture and the potential contribution to soil accumulation. *Environmental Pollution*, *349*, 123986. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123986>
- Maruf, M., Chang, Y. C., & Yang, L. (2024). Managing institutional interlinkages for the protection of marine environment in the East Asian seas region and beyond: The case of marine plastic pollution. *Ocean and Coastal Management*, *255*, 107232.
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107232>
- Maryadi, A. (2019). Sampah Menggunung di Jl Tun Abdul Razak Gowa, Warga Keluhkan Bau Menyengat. *Tribunnews.Com*. https://makassar.tribunnews.com/2019/05/09/sampah-menggunung-di-jl-tun-abdul-razak-gowa-warga-keluhkan-bau-menyengat#google_vignette
- Miguel, I., Santos, A., Venâncio, C., & Oliveira, M. (2024). Knowledge, concerns and attitudes towards plastic pollution: An empirical study of public perceptions in Portugal. *Science of the Total Environment*, *906*, 167784. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167784>
- Mneimneh, F., Haddad, N., & Ramakrishna, S. (2024). Recycle and Reuse to Reduce Plastic Waste - A Perspective Study Comparing Petro- and Bioplastics. *Circular Economy and Sustainability*, 43615. <https://doi.org/10.1007/s43615-024-00381-7>
- Muhmood, A. A. (2024). Utilization of recycle concrete aggregate and plastic wastes for construction the sub-base layer in flexible pavements. *AIP Conference Proceedings*, *2864*(1), 186125. <https://doi.org/10.1063/5.0186125>
- Nuojua, S., Cracknell, D., Heske, A., Pahl, S., Wyles, K. J., & Thompson, R. C. (2024). Global scoping review of behavioral interventions to reduce plastic pollution with recommendations for key sectors. *Conservation Science and Practice*, 13174. <https://doi.org/10.1111/csp2.13174>
- Okoffo, E. D., Tan, E., Grinham, A., Gaddam, S. M. R., Yip, J. Y. H., Twomey, A. J., Thomas, K. V., &

- Bostock, H. (2024). Plastic pollution in Moreton Bay sediments, Southeast Queensland, Australia. *Science of The Total Environment*, 920, 170987. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170987>
- Raha, U. K., Kumar, B. R., & Sarkar, S. K. (2021). Policy Framework for Mitigating Land-based Marine Plastic Pollution in the Gangetic Delta Region of Bay of Bengal- A review. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123409. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123409>
- Saleem, J., Moghal, Z. K. B., Shakoor, R. A., & McKay, G. (2023). Sustainable Solution for Plastic Pollution: Upcycling Waste Polypropylene Masks for Effective Oil-Spill Management. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(15), 3390. <https://doi.org/10.3390/ijms241512368>
- Silva Filho, C. R. V., & Velis, C. A. (2022). United Nations' plastic pollution treaty pathway puts waste and resources management sector at the centre of massive change. *Waste Management and Research*, 40(5), 487–489. <https://doi.org/10.1177/0734242X221094634>
- Thushari, G. G. N., & Senevirathna, J. D. M. (2020). Plastic pollution in the marine environment. *Heliyon*, 6(8), 4709. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04709>
- Willis, K. A., Putten, I. Van, & Hardesty, B. D. (2024). Addressing cultural context is the missing piece in policy solutions to plastic pollution. *Environmental Science and Policy*, 159, 103829. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103829>
- Willis, K., Maureaud, C., Wilcox, C., & Hardesty, B. D. (2018). How successful are waste abatement campaigns and government policies at reducing plastic waste into the marine environment? *Marine Policy*, 96(November 2017), 243–249. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.037>